

PENDIDIKAN INKLUSIF

“ Memahami Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif”

Mata Kuliah	: Pendidikan Inklusif
Kode Mata Kuliah	: KPD 620215
Semester/Kelas	: 4/J
Jumlah SKS	: 3 SKS
Dosen Pengampu	: 1. Dra. Nelly Astuti, M.Pd. 2. Amrina Izzatika, M.Pd.



Disusun Oleh :

Kelompok 9

1. Nadia Tri Utami (NPM 2213053300)
2. Nawang Lutfia Sani (NPM 2213053287)
3. Rahma Aulia Putri (NPM 2213053123)

**PROGRAM STUDI S1 PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan tugas makalah dengan judul “Memahami Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif”

Kami sangat berharap makalah ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan dan juga dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi pembaca, khususnya kami sangat menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun kami harapkan demi kesempurnaan makalah ini.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para Ibu dosen pengampu Mata Kuliah Pendidikan Karakter yang membimbing kami dalam pembuatan makalah ini.

Akhir kata kami mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan makalah ini dari awal sampai akhir. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai segala usaha kita. Aamiin.

Metro, 22 Februari 2024

Kelompok 9

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan.....	2
BAB II.....	3
PEMBAHASAN	3
2.1 Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi.....	3
2.2 Landasan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi	6
2.3 Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi	8
2.4 Strategi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi	8
2.5 Problematika Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif	11
BAB III.....	18
PENUTUP	18
3.1 Kesimpulan.....	18
3.2 Saran.....	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengembangan pendidikan saat ini mengarah pada model pendidikan inklusif (PI). Di hampir semua negara maju, anak-anak berkebutuhan khusus (ABK) dihargai, diperlakukan, dan dilayani dengan lebih rinci dan sangat manusiawi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mencantumkan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus. Kebijakan ini memberikan warna baru bagi anak berkebutuhan khusus. Pendidikan khusus juga didefinisikan sebagai pendidikan untuk siswa berkelainan atau dengan kecerdasan luar biasa. Misalnya, pendidikan inklusif di Amerika Serikat berkembang dengan cepat berkat banyak komponen yang saling mendukung. Selain itu, orang tua anak berkebutuhan khusus di Jepang memiliki kebebasan untuk memilih sekolah yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Sekolah yang menerima siswa berkebutuhan khusus menyediakan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan siswa tersebut. Di Indonesia, pendidikan inklusif sedang berkembang. Beberapa daerah telah menerima bantuan untuk dapat menerapkannya.

Dalam hal pendidikan, ketidaksamaan anak dalam hal penampilan, komunikasi, kemampuan, sikap, dan perilaku membuat mereka sangat rentan terhadap diskriminasi. Sistem pendidikan memperlakukan anak berkebutuhan khusus dengan tidak adil. Misalnya, anak-anak dengan kebutuhan khusus (ABK) harus bersekolah di sekolah luar biasa atau sekolah khusus. Pendidikan akan membantu meningkatkan kesadaran pluralisme. Pendidikan dianggap sebagai alat yang paling penting untuk internalisasi dan menyebarkan nilai-nilai pluralisme. Dengan demikian, diharapkan kesadaran tentang pluralisme akan meningkat di masyarakat luas. Oleh karena itu, sistem pendidikan multikultural saat ini dibangun di Indonesia tengah. Sistem pendidikan inklusif secara resmi dimulai di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada 11 Agustus 2004.

Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memungkinkan anak-anak berkebutuhan khusus belajar di sekolah-sekolah terdekat di kelas yang sama dengan siswa seusia mereka. Sekolah yang menerapkan sistem ini dikenal sebagai sekolah inklusif. Program pendidikan di sekolah ini layak, menantang, tetapi disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan setiap siswa, serta bantuan dan dukungan yang dapat diberikan oleh guru untuk membantu siswa berhasil (Stainback, 1980).

Pendidikan inklusif telah menjadi topik diskusi politik dan kemudian menjadi kebijakan. Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan layanan dan kemudahan serta memastikan bahwa pendidikan berkualitas tinggi diberikan kepada siswa di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penyelenggaraan Pendidikan inklusi?
2. Apa saja landasan penyelenggaraan Pendidikan inklusi?
3. Apa saja prinsip penyelenggaraan Pendidikan inklusi?
4. Bagaimana strategi penyelenggaraan Pendidikan inklusi?
5. Apa saja Problematika penyelenggaraan pendidikan inklusi?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui proses penyelenggaraa Pendidikan inklusi
2. Untuk mengetahui beberapa landasan penyelenggaraan Pendidikan inklusi
3. Untuk mengetahui beberapa prinsip penyelenggaraan Pendidikan inklusi
4. Untuk mengetahui strategi penyelenggaraan Pendidikan inklusi
5. Untuk mengetahui beberapa problematika dalam penyelenggaraan Pendidikan inklusi

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi

Pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang menerima anak-anak dengan keterbatasan tertentu dan menerima anak-anak lainnya yang menerima pendidikan tanpa mempertimbangkan keterbatasan masing-masing. Pendidikan inklusif, menurut Direktorat Pembinaan SLB (2007), adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak untuk belajar bersama-sama di sekolah umum dengan memperhatikan keragaman dan kebutuhan individual, sehingga potensi terbaik setiap anak dapat berkembang. Pendidikan inklusif berarti memberikan akses yang seluas-luasnya kepada semua siswa, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi dan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya (Garnida & Sumayyah, 2015).

Negara-negara Skandinavia seperti Denmark, Norwegia, dan Swedia pada awalnya memulai pendidikan inklusif di seluruh dunia. Pada tahun 1960-an, Presiden Kennedy mengirimkan akademisi Pendidikan Luar Biasa ke Skandinavia untuk belajar tentang mainstreaming dan lingkungan yang lebih terbatas. Pelajaran ini ternyata sesuai untuk diterapkan di Amerika Serikat. Selanjutnya, konsep pendidikan inklusif diperkenalkan di Inggris Raya dalam Ed. Act 1991. Ini menandai pergeseran model pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus dari segregatif ke integratif.

Pemerintah Republik Indonesia mengembangkan program pendidikan inklusif sejak awal tahun 2000 berdasarkan perkembangan sejarah pendidikan inklusif di seluruh dunia. Program ini merupakan kelanjutan dari program pendidikan terpadu yang pertama kali dimulai di Indonesia pada tahun 1980-an, tetapi kemudian kurang berkembang. Dengan mengikuti trend global, tahun 2000 muncul kembali dengan gagasan pendidikan inklusif.

Banyak hal yang harus dilakukan untuk menjalankan pendidikan inklusi di sekolah yang sudah ditunjuk dinas untuk melakukannya. Berdasarkan kebutuhan siswa, setiap sekolah menggunakan model layanan inklusi yang berbeda. Sesuai dengan keadaan dan sistem pendidikan yang ada di Indonesia,

model pendidikan inklusif yang paling cocok adalah yang menganggap inklusi sama dengan mainstreaming, menurut Vaughn, Bos, & Schumn (dalam effendi, 2013:22). Penempatan anak berkelainan di sekolah inklusi dapat dilakukan dengan berbagai model sebagai berikut:

- (1) **Kelas reguler (inklusi penuh)** yaitu anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) sepanjang hari di kelas reguler dengan menggunakan kurikulum yang sama,
- (2) **Kelas reguler dengan cluster** yaitu anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler dalam kelompok khusus,
- (3) **Kelas reguler dengan pull out** yaitu anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler namun dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus,
- (4) **Kelas reguler dengan cluster dan pull out** yaitu anak berkelainan belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler dalam kelompok khusus, dan dalam waktu-waktu tertentu ditarik dari kelas reguler ke ruang sumber untuk belajar dengan guru pembimbing khusus,
- (5) **Kelas khusus dengan berbagai pengintegrasian** yaitu anak berkelainan belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler, namun dalam bidang-bidang tertentu dapat belajar bersama anak lain (normal) di kelas reguler,
- (6) **Kelas khusus penuh**, yaitu Anak berkelainan belajar di dalam kelas khusus pada sekolah reguler. Dari pengertian di atas bisa di simpulkan bahwa terdapat sekkolah luar biasa (SLB) di dalam sekolah Inklusi. Jadi peserta didik berkebutuhan khusus hanya belajar di ruang khusus tanpa belajar di ruang reguler. sehingga kurikulum yang di gunakan di sesuaikan dengan siswa berkebutuhan khusus dan guru yang mengajar harus memiliki latar belakang S1 Pendidikan Luar Biasa.

Untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif, sekolah harus menyesuaikan kurikulum, sarana, dan sistem pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu siswa. Oleh karena itu, individu yang tepat harus diidentifikasi dan dievaluasi untuk membuat program pendidikan yang sesuai dan mencapai tujuan. Sekolah inklusif adalah sekolah biasa/reguler yang menyelenggarakan

pendidikan inklusif dengan mengakomodasi semua peserta didik baik anak normal maupun anak berkebutuhan khusus (Tarmasyah, 2007; Marthan, 2007; Loiacono danValenti, 2010). yaitu anak yang menyandang kelainan fisik, intelektual, sosial, emosi, mental, cerdas, berbakat istimewa, suku terasing, korban bencana alam, bencana sosial/miskin, mempunyai perbedaan warna kulit, gender, suku bangsa, ras, bahasa, budaya, agama, tempat tinggal, kelompok politik, anak kembar, yatim, yatim piatu, anak terlantar, anak tuna wisma, anak terbuang, anak yang terlibat sistem pengadilan remaja, anak terkena daerah konflik senjata, anak pengemis, anak terkena dampak narkoba HIV/AIDS (ODHA), anak nomaden dan lain-lain sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya (Alimin & Permanarian, 2005).

Salah satu model pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus adalah pendidikan inklusif. Sekolah segresi dan pendidikan terpadu adalah model tambahan. Perbedaan ketiga model tersebut dapat diringkas sebagai berikut:

- (1) Sekolah Segresi adalah sekolah yang membedakan siswa berkebutuhan khusus dari sistem persekolahan reguler. Sekolah segresi ini di Indonesia dikenal sebagai satuan pendidikan khusus atau Sekolah Luar Biasa sesuai dengan jenis kelainan siswa. Sebagai contoh, SLB/A untuk anak tuna netra, SLB/B untuk anak tuna rungu, dan SLB/E untuk anak tuna laras.
- (2) Sekolah terpadu adalah sekolah yang memungkinkan siswa berkebutuhan khusus mengikuti pendidikan di sekolah reguler tanpa adanya perlakuan khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan unik mereka.
- (3) Sekolah inklusif adalah evolusi baru dari pendidikan terpadu. Di sekolah ini, setiap siswa didik secara khusus untuk memenuhi kebutuhan mereka. Banyak hal yang perlu diubah, termasuk kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, sistem pembelajaran, dan sistem penilaian.

Pendidikan inklusif di Indonesia diselenggarakan dengan tujuan:

- (1) Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya.

- (2) Membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar
- (3) Membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah
- (4) Menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif serta ramah terhadap pembelajaran (Direktorat, 2007)

Profil pembelajaran di sekolah inklusif adalah (1) Menciptakan dan menjaga komunitas kelas, yang hangat, menerima keanekaragaman, dan menghargai perbedaan. (2) Menuntut penerapan kurikulum yang multilevel dan multimodalitas. (3) Menyiapkan dan mendorong guru untuk mengajar secara interaktif. (UNESCO, 2002). Menjadi Guru yang berkompeten dan Tangguh di sekolah inklusif Pada dasarnya adalah tanggung jawab utama guru dalam mengajar dan mendidik. Sebagai pendidik, mereka berfungsi sebagai perantara aktif antara siswa dan ilmu pengetahuan. Selain itu, sebagai pendidik, mereka berfungsi sebagai perantara aktif antara siswa dan haluan negara, filsafat, dan kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Mereka juga berperan dalam pengembangan pribadi siswa dan mendekatkan mereka dengan pengaruh positif dan menjauhkan mereka dari pengaruh negatif (Hidayat, 2009). Kemampuan umum (general ability), kemampuan dasar (basic ability), dan kemampuan khusus adalah tiga kemampuan yang harus dimiliki oleh guru yang berpengalaman dan tangguh dalam pendidikan inklusif.

2.2 Landasan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi

Direktorat PSLB saat ini mendorong program pendidikan inklusif, sesuai dengan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa "Pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik." Pendidikan inklusif di Indonesia memiliki landasan filosofis, yuridis, dan pedagogis yang paling kuat.

1. Landasan Filosofis

Pendidikan inklusif di Indonesia didasarkan pada Pancasila, yang terdiri dari lima pilar dan prinsip Bhineka Tunggal Ika, yang merupakan fondasi filosofis utama. Filosofi Bhinneka Tunggal Ika mengakui kebinekaan

manusia, baik vertikal maupun horisontal, dan memiliki satu misi sebagai umat Tuhan di bumi. Filosofi ini percaya bahwa manusia memiliki potensi dan dapat tumbuh hingga batas yang hampir tak terbatas jika mereka dikembangkan melalui pendidikan yang baik dan benar.

2. Landasan Yuridis

Dalam menerapkan pendidikan inklusi pada anak ABK maka diperlukannya landasan yuridis untuk memperkuat ideologi masyarakat diantaranya: **1)** UUD 1945, **2)** UU Nomor 4 tahun 1997, **3)** UU nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, **4)** UU nomor 22 tahun 2003 tentang perlindungan anak, **5)** UU nomor 20 tahun 2003 nomor 23 tentang sistem pendidikan nasional, **6)** peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standart nasional pendidikan, dan **7)** surat edaran Dirjen Diknasmen no 30/C. C6/MN/2003 tanggal 20 januari 2003 perihal pendidikan inklusif menyelenggarakan dan mengembangkan di setiap kabupaten/kota sekurang-kurangnya 4 (empat) sekolah terdiri dari SD, SMP, SMA dan SMK.

3. Landasan Pedagogik

Pasal 3 UU No. 20 tahun 2003 tentang sisdiknas menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Jadi melalui pendidikan, peserta didik berkelaian dibentuk menjadi warga Negara yang demokratis dan bertanggung jawab, yaitu individu yang mampu menghargai peerbedaan dan berpartisipasi dalam masyarakat. Tujuan ini mustahil tercapai jika sejak awal mereka diisolasi dari teman sebayanya di sekolah-sekolah khusus. Betapapun kecilnya, mereka harus diberi kesempatan bersama teman sebayanya.

4. Landasan Empiris

Landasan empiris merupakan landasan yang memberikan arah dan penjelasan tentang keadaan pendidikan saat ini dan tantangan masa depan

bagi masyarakat pendidikan, serta memberikan landasan bagi teori pembangunan. tingkat pendidikan.

2.3 Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi

Penyelenggaraan pendidikan inklusif didasarkan pada beberapa prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip pemerataan dan peningkatan mutu.

Pendidikan inklusif adalah filosofi dan pendekatan untuk mencapai kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan meningkatkan kualitasnya. Ini memungkinkan semua siswa memiliki akses ke pendidikan yang menghormati perbedaan.

2. Prinsip keberagaman.

Pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik unik peserta didik karena masing-masing peserta didik memiliki kemampuan, bakat, minat, dan kebutuhan yang berbeda.

3. Prinsip kebermaknaan.

Pendidikan inklusif harus menciptakan dan mempertahankan komunitas kelas yang ramah, menerima, keragaman, dan menghargai perbedaan. Ini juga penting untuk memfasilitasi kemandirian siswa.

4. Prinsip keberlanjutan

Semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan menerima pendidikan inklusif secara berkelanjutan.

5. Prinsip keterlibatan

Penyelenggaraan pendidikan inklusif harus melibatkan seluruh komponen pendidikan terkait.

2.4 Strategi Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi

Untuk mencapai pembelajaran inklusif, guru telah menerapkan pembelajaran adaptif untuk anak yang mengalami kesulitan belajar. Ini berarti pembelajaran menyesuaikan dengan kondisi siswa bukan menyesuaikan dengan pembelajaran. Penyesuaian ini tentunya terkait dengan metode,

strategi, materi, media, dan lingkungan belajar. Strategi model pembelajaran klasikal adalah model pembelajaran di mana siswa normal dan berkebutuhan khusus mengikuti pelajaran dalam satu kelas. Sedangkan, model pembelajaran individual adalah model di mana siswa dengan kesulitan belajar atau kebutuhan khusus mendapatkan lebih banyak waktu belajar, biasanya setelah kelas selesai.

Guru memiliki peran yang sangat penting dalam membangun sikap siswa agar selalu menghargai orang lain, terutama bagi mereka yang berada dalam kelompok berbeda. Agar peran mereka berhasil, langkah-langkah berikut harus dilakukan: (1) Guru harus memahami pentingnya menunjukkan sikap anti-diskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus. Jika mereka memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup, mereka dapat membantu siswa belajar untuk menghindari tindakan diskriminatif. (2) Guru diharapkan mampu mempraktekkan sikap anti-diskriminasi di dalam dan di luar kelas, termasuk di luar sekolah, sehingga siswa dapat mencontoh dan menerapkan sikap anti-diskriminasi dalam kehidupan mereka sehari-hari. (3) Guru harus memiliki sensitifitas terhadap siswa berkebutuhan khusus, terutama jika ada diskriminasi karena keterbatasan kemampuan.

Pada dasarnya, strategi pembelajaran adalah cara untuk menggunakan berbagai elemen pembelajaran secara optimal dan tepat. Oleh karena itu, dengan mendorong strategi pembelajaran yang inovatif, guru dapat meningkatkan pemanfaatan materi pembelajaran, tujuan, materi, media, metode, evaluasi, dan lingkungan belajar siswa. Remedial teaching berfokus pada peserta didik yang mengalami kesulitan belajar dan menulis. Ini adalah salah satu strategi pembelajaran yang dapat digunakan untuk peserta didik ABK di jenjang Sekolah Dasar (Khalid dan Anjum, 2019). Remedial teaching merupakan perbaikan yang bersifat khusus disesuaikan dengan karakteristik kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik (Hsiao dkk., 2016; Kumar dan Chaturvedi 2014). Secara khusus guru memberikan layanan untuk peserta didik memperbaiki prestasi belajar dan mencapai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM).

Pada kondisi berbeda, strategi pembelajaran kreatif yang bisa digunakan untuk ABK dengan gangguan pendengaran (Tunarungu), yaitu; strategi deduktif, induktif, heuristik, ekspositori, klasikal, maupun kooperatif. Namun, strategi pembelajaran yang bisa digunakan bagi ABK down syndromedimaksudkan untuk merubah perilaku peserta didik yang awalnya tidak mengerti sehingga mengerti pembelajaran (Ilahi, 2013).

Guru disarankan untuk mengeksplorasi media belajar yang ramah bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Contoh media belajar yang ramah bagi peserta didik berkebutuhan khusus adalah puzzle yang ditujukan untuk melatih logika peserta didik. Contoh penggunaan puzzle rantai dengan gambar binatang seperti burung melatih peserta didik menyimpulkan dimana letak organ tubuh binatang tersebut. Tentunya pengetahuan ini didasari dengan logika yang tepat yakni bentuk burung seutuhnya. Permainan puzzle, bagi peserta didik sebagai upaya untuk memasang/menyusun puzzle tersebut tanpa terdapat petunjuk. Lewat contoh serta arahan, mereka telah bisa meningkatkan aspek kognitif dengan melaksanakan game tersebut cocok dengan wujud, warna, serta tata posisinya (Asyhar, 2011). Disaat bermain, peserta didik diharapkan mampu memahami dimensi, warna, dan wujud yang berbeda pada tiap bagian dari objek puzzle tersebut. Praktis pemanfaatan media pembelajaran yang ramah bagi peserta didik ABK ialah bukti bagaimana guru sangat memahami prinsip strategi pembelajaran yang kreatif. Strategi pembelajaran yang tepat tidak hanya untuk meningkatkan motivasi peserta didik. Tetapi juga sigap terhadap kondisi di kelas



Sumber; <http://plakotamalang.web.id/puzzle-untuk-anak-dengan-autisme/diakses> 17 Juni 2021

2.5 Problematika Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Sekalipun perkembangan pendidikan inklusi di negara kita cukup menggembirakan dan mendapat apresiasi dan antusiasme dari berbagai kalangan, terutama para praktisi pendidikan namun sejauh ini dalam tataran implementasinya di lapangan masih dihadapkan kepada berbagai isu dan permasalahan.

Problematika dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di sekolah dapat dijabarkan dalam beberapa aspek, antara lain sebagai berikut:

1. Peserta didik

Dalam arti luas, peserta didik adalah setiap orang yang terkait dengan proses pendidikan sepanjang hayat. Sedangkan dalam arti sempit, peserta didik adalah setiap siswa yang belajar di sekolah. Peserta didik merupakan subjek fokus utama dalam penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran sehingga para guru harus merasa atau menganggap bahwa pemahaman dan perlakuan terhadap peserta didik sebagai suatu totalitas atau kesatuan.

Pendidikan bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa arti pendidikan itu sendiri adalah upaya normatif yang membawa manusia untuk merealisasikan diri (Ilahi & Rose, 2013). Permasalahan yang berkaitan dengan peserta didik dalam Agustin, (2019) meliputi:

- a. ABK dengan permasalahan berbeda dan memerlukan penanganan yang berbeda dan terdapat dalam satu kelas akan menjadi kendala dan kesulitan tersendiri bagi GPK dalam melakukan pelayanan
- b. ABK mengalami Kesulitan mengikuti materi pelajaran, hal ini dikarenakan kemampuan akademik bagi ABK yang jauh tertinggal dengan anak reguler sehingga perlu adanya banyak penyesuaian
- c. Sikap ABK yang belum bisa mengikuti aturan sehingga dapat mengganggu proses KBM

d. Permasalahan siswa regular terhadap ABK terkait dengan kurangnya rasa empati dan peduli terhadap kekurangan yang dimiliki oleh anak ABK (Rizki Ailulia, 2021).

2. Kurikulum

Kurikulum pendidikan inklusi pada dasarnya menganut fleksibel kurikulum, dimana kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing peserta didik, dan dibuat dengan karakteristik dari lembaga penyelenggara pendidikan itu sendiri, tanpa mengesampingkan pedoman yang telah ada.

Pengembangan dan pelaksanaan kurikulum pendidikan inklusi itu sendiri hendaknya menumbuhkan kemandirian, berpikir kritis, dan dapat membangkitkan nilai-nilai kebersamaan dalam lingkungan pendidikan.

Kurikulum hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, tidak seperti yang terjadi selama ini, dimana peserta didik dipaksakan mengikuti kurikulum. Permasalahan yang sering terjadi yaitu kurikulum pembelajaran dan penilaian belum sesuai dengan kebutuhan anak. Kurikulum yang sesuai dengan pendidikan inklusi adalah kurikulum yang dimodifikasi, yaitu kurikulum peserta didik regular yang disesuaikan (dimodifikasi sesuai) dengan kemampuan awal dan karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus (Noviandari et al., 2021).

3. Tenaga Pendidik.

Menurut Tarnoto, (2016) permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan sekolah inklusi berdasarkan persepsi dari tenaga pendidik (guru). Permasalahan utama yang banyak dikeluhkan guru adalah:

- a. Kurangnya Guru Pendamping Kelas (GPK).
- b. Kurangnya kompetensi guru dalam menangani ABK, guru kesulitan dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM).
- c. Kurangnya pemahaman guru tentang ABK dan Sekolah Inklusi.
- d. Latar belakang pendidikan guru yang tidak sesuai.

e. Beban administrasi yang semakin berat untuk guru.

f. Kurangnya kesabaran guru dalam menghadapi ABK dan terakhir guru mengalami kesulitan dengan orang tua.

Permasalahan yang terjadi adalah Masih kurangnya pengetahuan penanganan anak berkebutuhan khusus, dikarenakan guru bukan dari pendidikan luar biasa. Pada umumnya guru di sekolah dasar berasal dari program studi pendidikan guru sekolah dasar, sehingga memiliki keterbatasan informasi mengenai penanganan anak berkebutuhan khusus secara spesifik. Selain itu faktor penghambat dalam pelaksanaan program pendidikan inklusi adalah kurikulum yang belum berreorientasi disusun untuk program sekolah inklusi, sehingga hal tersebut menjadi kesulitan tersendiri bagi pendidik. Disamping itu sarana pendukung di sekolah belum cukup memadai untuk memfasilitasi anak berkebutuhan khusus (Setianingsih & Listyarini, 2019).

4. Kegiatan Pembelajaran

Proses pembelajaran yang belum menggunakan sistem team teaching menyebabkan anak berkebutuhan khusus mengalami kesulitan dalam menerima materi pelajaran. Sistem team teaching sangat diperlukan untuk menunjang koordinasi dan kerja sama antar anak-anak agar semakin kompak dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Permasalahan tentang sistem pengajaran juga belum memberikan jaminan akan keberhasilan anak berkebutuhan khusus dalam menangkap materi pembelajaran karena belum tersedianya fasilitas dan media pembelajaran (Ulfa Meila Elfiana, Aan Widiyono, 2022). Dalam proses pembelajaran diharapkan adanya perubahan perilaku peserta didik ke arah yang lebih baik.

Pembelajaran merupakan proses interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. Dalam interaksi tersebut banyak faktor eksternal maupun internal yang mempengaruhinya. Dalam hal ini tugas guru yang paling utama yaitu mengoptimalkan lingkungan agar menunjang terjadinya perubahan perilaku peserta didik ke arah yang lebih baik (Hera, 2018)

5. Manajemen sekolah

Manajemen pendidikan inklusi adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen pendidikan pada sekolah inklusi memberikan kewenangan penuh kepada kepala sekolah mengatur segala kebutuhan penyelenggaraan meliputi siswa, kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan hubungan dengan masyarakat (Zaini, 2022).

Menurut Agustin, (2019) permasalahan terkait dengan manajemen pendidikan inklusi antara lain:

- a. Perencanaan pengelolaan pendidikan inklusi yang belum sepenuhnya melibatkan guru dan personel lainnya.
- b. Pengorganisasian dalam pembagian tugas belum dijalankan secara maksimal oleh guru yang menerima tugas dan pengawasan kegiatan atau program belum terjadi secara menyeluruh.
- c. Belum siapnya sekolah dengan program sekolah inklusi baik dari segi administrasi dan SDM.
- d. Proses KBM yang belum berjalan maksimal, selama ini ABK belum mendapatkan pelayanan khusus dan program khusus dari sekolah dalam hal pengembangan potensi.

6. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana merupakan perangkat keras maupun perangkat lunak yang digunakan untuk menunjang keberhasilan pendidikan inklusif di satuan pendidikan tertentu (David Wijaya, 2019). Keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia memegang peranan penting bagi anak yang berkebutuhan khusus, karena mereka akan sangat bergantung pada media pembelajaran. Setiap ABK mempunyai beragam karakteristik dan kebutuhan yang berbeda-beda sehingga pihak sekolah inklusif juga perlu menyiapkan berbagai macam media pembelajaran. Hal inilah yang menjadi permasalahan utama karena sebagian

besar sekolah inklusif belum mampu menyediakan berbagai media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus (Agustin, 2019). Selain itu, keberadaan media pembelajaran adaptif belum dipergunakan secara maksimal dan hanya terdapat media biasa untuk peserta didik reguler sedangkan tidak adanya media khusus untuk peserta didik ABK agar lebih mudah memahami pembelajaran (Hera, 2018).

7. Kerjasama

Aspek kerjasama yang dimaksud adalah kerjasama yang terjalin antara sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dengan pemerintah dan wali murid. Menurut Nurcahyani (dalam Intan et al., 2020) memaparkan bahwa peran aktif dari pemerintah masih kurang terhadap pelaksanaan sekolah inklusi, diantaranya:

- a. Kebijakan terkait pelaksanaan sekolah inklusi belum jelas.
- b. Belum adanya modifikasi kurikulum khusus sekolah inklusi, kurangnya pelatihan tentang pendidikan inklusi kepada guru.
- c. Perhatian pemerintah terhadap tenaga professional yang mendukung sekolah inklusi kurang baik dari segi jumlah dan kesejahteraannya.
- d. Program yang dilakukan pemerintah belum berkelanjutan.
- e. Belum ada lembaga khusus yang menangani pelatihan pendampingan ABK.

8. Masyarakat

Kondisi lingkungan masyarakat yang terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, baik dari segi jenjang pendidikan, profesi, dll akan memberikan respon yang berbeda pula terhadap keberadaan anak yang berkebutuhan khusus. Secara umum, masih terdapat masyarakat yang melihat dan mempunyai tanggapan bahwa anak yang berkebutuhan khusus adalah anak yang aneh, sehingga pada saat mereka berhadapan atau bertemu dengan ABK di lingkungan masyarakat, mereka akan memilih cuek akan beradaan ABK bahkan sampai menghindarinya. Hal tersebut dapat menjadi bukti nyata bahwa

kurangnya perhatian serta kepedulian dari masyarakat terhadap pendidikan inklusi bagi anak yang berkebutuhan khusus sebab adanya pandangan negatif yang melekat dalam masyarakat luas (Intan et al., 2020).

Adapun permasalahan- permasalahan lain yang sering dihadapi adalah sebagai berikut:

a) Pemahaman inklusi dan implikasinya

- 1) Pendidikan inklusi bagi anak berkelainan belum dipahami sebagai upaya peningkatan kualitas layanan pendidikan, masih dipahami sebagai upaya memasukkan disabled children ke sekolah regular dalam rangka give education right dan kemudahan access education and againt discrimination.
- 2) Pendidikan inklusi cenderung dipersepsi sama dengan integrasi sehingga masih ditemukan pendapat bahwa anak harus menyesuaikan dengan sistem sekolah.
- 3) Secara implementasinya guru cenderung belum mampu bersikap proaktif dan ramah terhadap semua anak sehingga menimbulkan komplain orang tua.

b) Kebijakan sekolah

- 1) Sekalipun sudah didukung dengan visi yang cukup jelas menerima semua jenis anak berkebutuhan khusus, sebagian sudah memiliki guru khusus anak berkebutuhan mempunyai catatan hambatan belajar pada masing-masing anak berkebutuhan khusus dan kebebasan guru kelas dan guru khusus untuk mengimplementasikan pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif, namun cenderung belum didukung dengan koordinasi dengan tenaga profesional, organisasi atau institusi terkait.
- 2) Masih terdapat kebijakan yang kurang tepat yaitu guru kelas tidak memiliki tanggung jawab pada kemajuan belajar anak berkebutuhan khusus serta keharusan orang tua anak berkebutuhan khusus dalam penyediaan guru khusus.

c) Proses pembelajaran

- 1) Proses pembelajaran belum dilaksanakan dalam bentuk team teaching, tidak dilakukan secara terkoordinasi.
- 2) Guru cenderung masih mengalami kesulitan dalam merumuskan flexible curriculum, pembuatan IEP (Individualized Educational Program) dan dalam menentukan tujuan, materi, dan metode pembelajaran.
- 3) Masih terjadi kesalahan praktek bahwa target kurikulum ABK sama dengan siswa lainnya serta anggapan bahwa siswa ABK tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk menguasai materi belajar.
- 4) Karena keterbatasan fasilitas sekolah, pelaksanaan pembelajaran belum menggunakan media, resource, dan lingkungan yang beragam sesuai kebutuhan anak.

d) Kondisi guru

- 1) Belum didukung dengan kualitas guru yang memadai, guru kelas masih dipandang not sensitive and proactive yet to the special needs children.
- 2) Keberadaan guru khusus masih dinilai belum sensitif dan proaktif terhadap permasalahan yang dihadapi ABK.

e) Sistem dukungan

- 1) Belum didukung dengan sistem dukungan yang memadai peran orang tua, sekolah khusus, tenaga ahli, perguruan tinggi-LPTK PLB dan pemerintah masih dinilai minimal. Sementara itu fasilitas sekolah juga masih terbatas.
- 2) Keterlibatan orang tua sebagai salah satu kunci keberhasilan dalam pendidikan inklusi, belum terbina dengan baik dampaknya orang tua sering bersikap kurang peduli dan realistik terhadap anaknya.

BAB III

PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk belajar bersama-sama di sekolah umum dengan memperhatikan keragaman dan kebutuhan individual, sehingga potensi terbaik setiap anak dapat berkembang.

Landasan pendidikan inklusif meliputi landasan filosofis, landasan empiris, dan landasan yuridis. Landasan filosofis mencakup prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan prinsip pemerataan dan peningkatan mutu. Landasan empiris memberikan arah dan penjelasan tentang keadaan pendidikan serta prinsip kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan. Landasan yuridis mencakup berbagai undang-undang terkait hak asasi manusia, perlindungan anak, dan sistem pendidikan nasional.

Beberapa aspek yang menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi termasuk kurangnya pengetahuan dan keterampilan guru, kurikulum yang belum sesuai, serta kurangnya media pembelajaran yang sesuai. Diperlukan kerjasama antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas pendidikan inklusi. Pendidikan inklusif adalah model pendidikan yang memungkinkan anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan yang layak sesuai kebutuhan mereka, dengan prinsip pemerataan, keberagaman, kebermaknaan, keberlanjutan, dan keterlibatan. Guru di sekolah inklusif harus memiliki kemampuan umum, dasar, dan khusus, serta mempraktekkan sikap anti-diskriminasi dan menggunakan strategi pembelajaran kreatif. Pendidikan inklusif memberikan akses yang seluas-luasnya kepada semua siswa, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk mendapatkan pendidikan berkualitas tinggi dan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Sekolah inklusif memerlukan penyesuaian kurikulum, sarana, dan sistem pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan individu siswa.

3.2 Saran

Penyelenggaraan pendidikan inklusif memerlukan perhatian yang serius dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi, terutama terkait dengan guru, kurikulum, sistem dukungan, dan keterlibatan orang tua. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan inklusi, beberapa saran dapat diimplementasikan.

Pertama, penting untuk memberikan pelatihan dan pengembangan profesional yang kontinu kepada guru agar mereka memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mendukung keberagaman siswa, termasuk anak berkebutuhan khusus. Guru perlu memahami kebutuhan individual setiap siswa dan mampu menggunakan strategi pembelajaran yang sesuai.

Kedua, pengembangan kurikulum inklusif yang responsif terhadap kebutuhan individu siswa sangat penting. Kurikulum harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat mengakomodasi keberagaman siswa dan memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi semua peserta didik.

Ketiga, keterlibatan orang tua juga perlu ditingkatkan dalam mendukung proses pembelajaran anak. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perkembangan anak di sekolah, termasuk anak berkebutuhan khusus. Komunikasi yang baik antara sekolah dan orang tua serta partisipasi aktif orang tua dalam kegiatan sekolah dapat meningkatkan efektivitas pendidikan inklusi.

Terakhir, kerjasama antara sekolah, pemerintah, dan masyarakat juga sangat diperlukan dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan mendukung bagi semua siswa. Dengan adanya kolaborasi yang baik antara berbagai pihak terkait, penyelenggaraan pendidikan inklusi dapat menjadi lebih efektif dan berdampak positif bagi perkembangan seluruh siswa, termasuk anak berkebutuhan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Admalinda, A., Fitriani, W., & Khairat, A. (2023). Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif untuk Individu Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Pendidikan*, 11(2), 291-299.
- Anjarsari, A. D. (2018). Penyelenggaraan pendidikan inklusi pada jenjang SD, SMP, dan SMA di Kabupaten Sidoarjo. *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)*, 1(2), 91-04.
- Arriani, F., Agustiawati, A., Rizki, A., Widiyanti, R., Wibowo, S., Herawati, F., & Tulalessy, C. (2021). Panduan pelaksanaan pendidikan inklusif.
- Aulia, W. (2016). Model dan Strategi Pembelajaran Anak Berkebutuhan Khusus dalam Setting Pendidikan Inklusi.
- Lattu, D. (2018). Peran guru bimbingan dan konseling pada sekolah penyelenggara pendidikan inklusi. *Jurnal Bimbingan dan Konseling Terapan*, 2(1), 61-67.
- Ni'mah, N. U., Istirohmah, A. N., Hamidaturrohmah, H., & Widiyono, A. (2022). Problematika Penyelenggara Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *Journal on Teacher Education*, 3(3), 345-353.
- Nurfadillah, S., Saadah, L., Cahyani, A. P., Haya, A. F., Rachma, S. N., Umayyah, N., & Huzaemah, H. (2022). Landasan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi di Sekolah Alam Tangerang. *MASALIQ*, 2(6), 669-677.
- Tanjung, R., Supriani, Y., Arifudin, O., & Ulfah, U. (2022). Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi pada Lembaga Pendidikan Islam. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(1), 339-348.
- Yuwono, I., & Mirnawati, M. (2021). Strategi Pembelajaran Kreatif dalam Pendidikan Inklusi di Jenjang Sekolah Dasar. *Jurnal basicedu*, 5(4), 2015-2020.